



LAPORAN KINERJA

2023

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKj Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2023 masih tetap memprioritaskan kebijakan belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi masyarakat miskin/kurang mampu serta penanganan dampak ekonomi terutama menjaga dunia usaha tetap hidup harus terus dilakukan.

Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2024

KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Drs. H. TARMIN , M.Si
196811111990091001

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:


1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Formulasi Perhitungan:
Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)
 - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Program Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 15,250 Triliyun Rupiah; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 21,705 Triliyun Rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target 142,33%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 20,810 Triliyun rupiah terjadi peningkatan sebesar 0.895 Triliyun Rupiah.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan”:
 - Diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Nilai Lapangan Usaha Perdagangan, Formulasi Perhitungan:
Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)
 - Capaian indikator (a.) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 6

(enam) Program, yakni Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 12,250 Triliyun Rupiah; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 16,103 Triliyun Rupiah. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap mencapai 131,45%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 14,979 Triliyun rupiah terjadi peningkatan sebesar 1,124 Triliyun rupiah.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah”:


- Diukur dengan indikator sebagai berikut:
- Nilai RB Perangkat Daerah, Formulasi Perhitungan: Formula Perhitungan: Formula Perhitungan: Nilai RB Perangkat Daerah Tahun (N)
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 67; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 87,79. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target mencapai 131,03%.
- Capaian target tahun 2022 sama dengan capaian target tahun 2023 sebesar 87,79.



Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha industri dan pengembangan industri hilirisasi/ produk
2. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha industri besar dalam penyampaian data industri
3. Peningkatan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah hingga ke agen dan toko-toko, pengendalian harga dan operasi pasar
4. Pengembangan diversifikasi produk ekspor, masih didominasi oleh ekspor Timah

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan datang.



Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	6
Daftar Tabel	8
Daftar Gambar	9
BAB I	10
Pendahuluan	10
1.1. <i>Cascading</i> Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	11
1.2. <i>Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan</i>	16
1.3. <i>Isu-Isu Strategis</i>	18
1.4. <i>Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran</i>	18
BAB 2	27
Perencanaan	27
2.1. <i>Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD</i>	27
2.2. <i>Strategi dan Arah Kebijakan</i>	28
2.3. <i>Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023</i>	29
2.4. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i>	35
BAB 3	38
Akuntabilitas Kinerja	38
3.1. <i>Capaian Kinerja Tahun 2023</i>	38
3.1.1. <i>Sasaran : Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (sasaran kesatu)</i>	40
3.1.2. <i>Faktor Pendukung keberhasilan</i>	49
3.1.3. <i>Faktor Penghambat keberhasilan</i>	49
3.1.4. <i>Upaya kedepan mendukung keberhasilan</i>	50
3.2.1. <i>Sasaran : Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan (sasaran kedua)</i>	25
3.2.2. <i>Faktor Pendukung keberhasilan</i>	39
3.2.3. <i>Faktor Penghambat keberhasilan</i>	40

3.2.4. Upaya kedepan mendukung keberhasilan.....	42
3.3.1. Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (sasaran ketiga)	45
3.3.2. Faktor Pendukung keberhasilan	54
3.3.3. Faktor Penghambat keberhasilan.....	54
3.3.4. Upaya kedepan mendukung keberhasilan.....	54
3.4. Efisiensi Anggaran.....	55
3.5. Inovasi	57
3.6. Penghargaan	58
BAB 4	59
Penutup.....	59

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	19
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	24
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023	26
Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	26
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023-2026	28
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	28
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023	35
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023	36
Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023	39
Tabel III.3.1.1.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	40
Tabel III.3.1.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	40
Tabel III.3.1.1.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	44
Tabel III.3.2.1.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	25
Tabel III.3.2.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	25
Tabel III.3.2.1.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	32
Tabel III.3.3.1.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	45
Tabel III.3.3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	45
Tabel III.3.3.1.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	50
Tabel III.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	56

Daftar Gambar

Gambar I.2.....	16
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16
Gambar III.1 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023	45
Gambar III.2 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023	33
Gambar III.3 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023	51

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2019*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

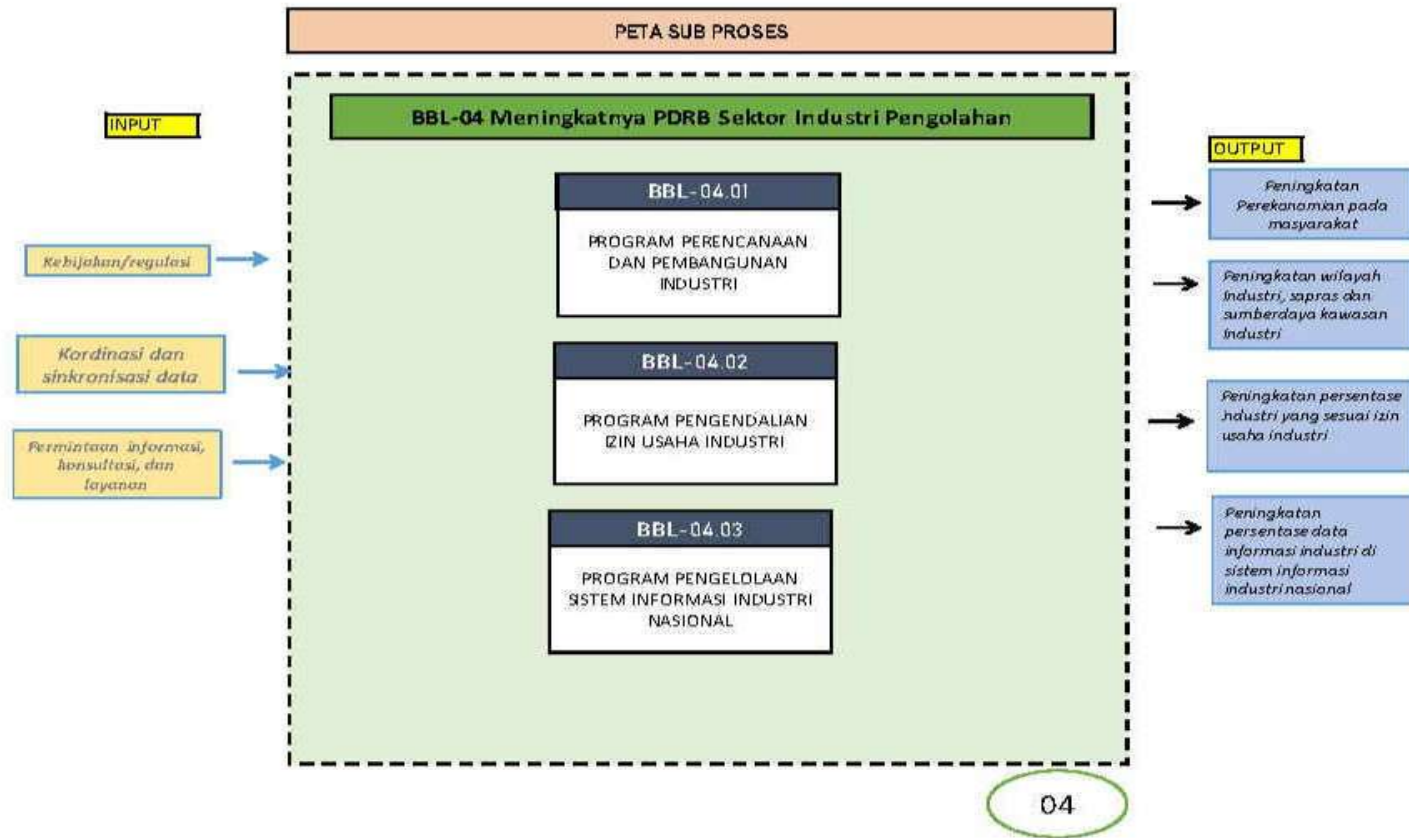
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjainstansi.

1.1. *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

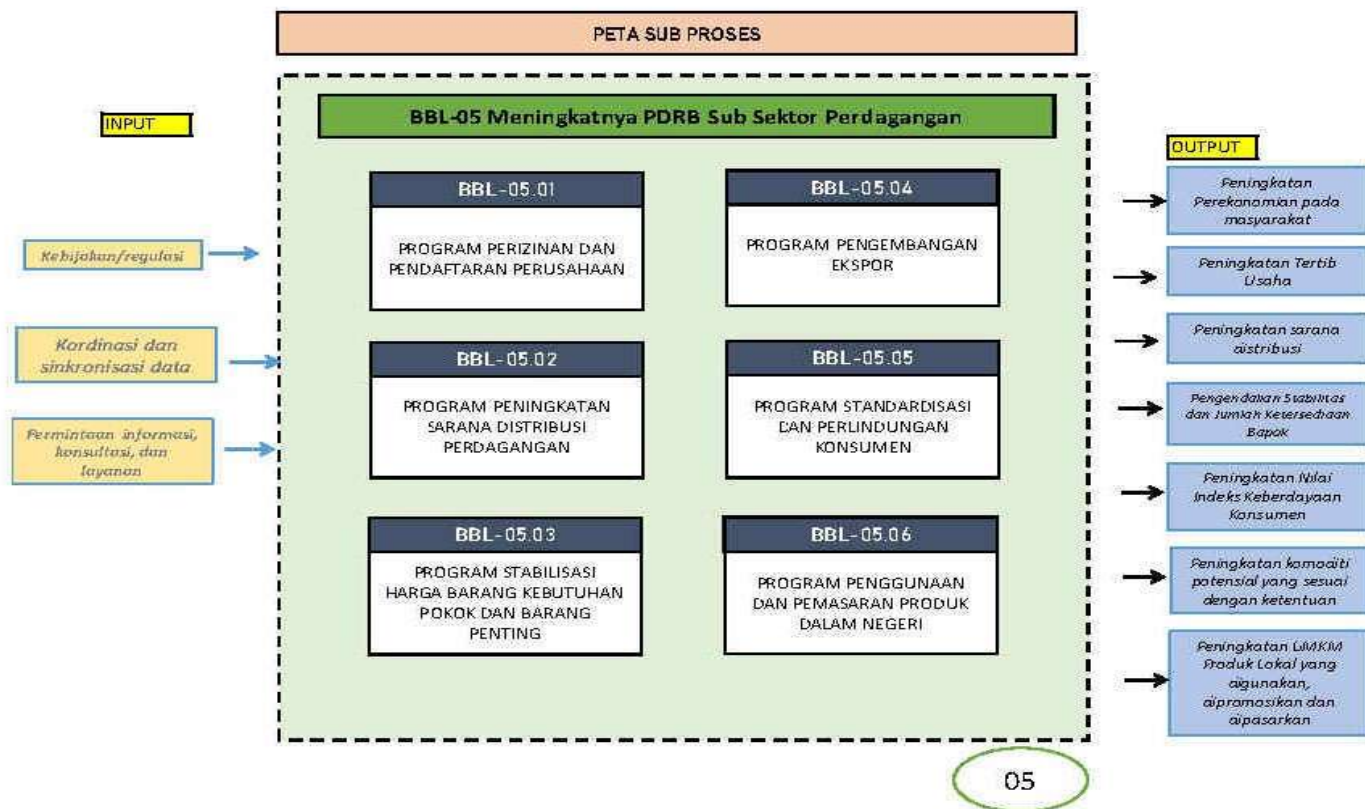
Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

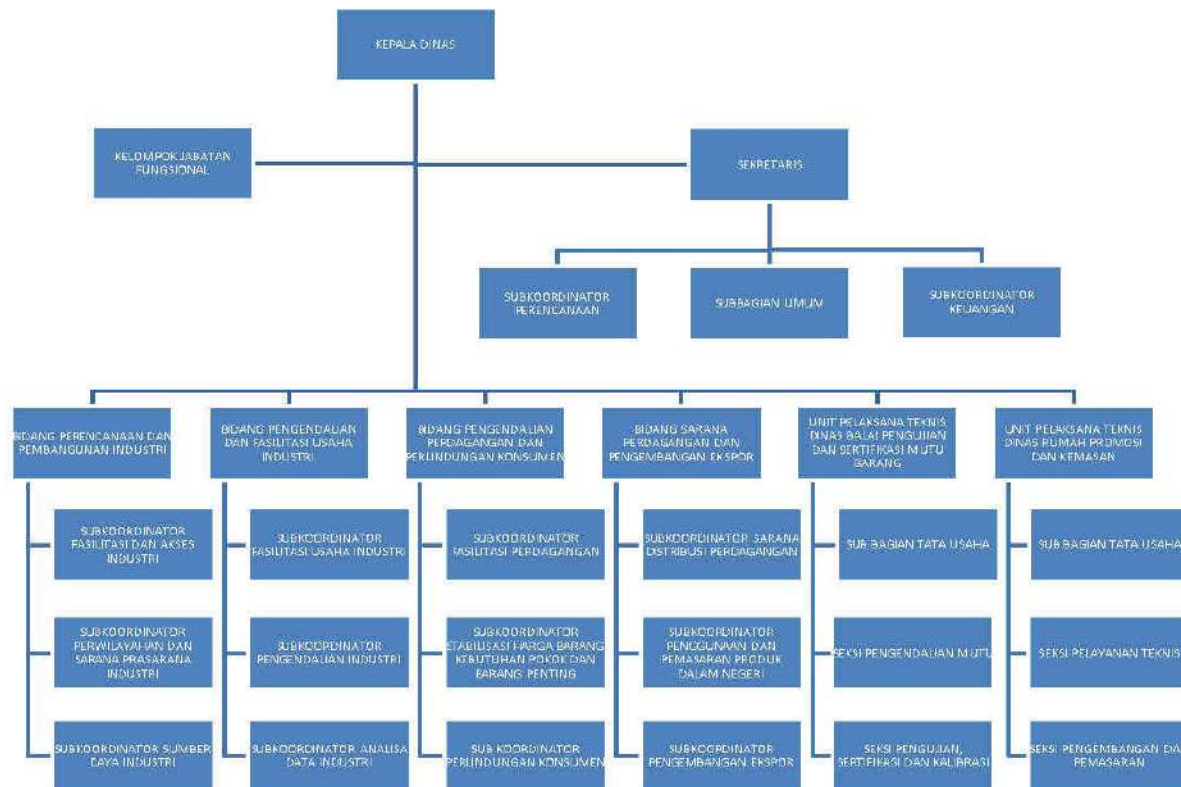
"PETA PROSES BISNIS"



"PETA PROSES BISNIS"



“STRUKTUR ORGANISASI”



1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



PETA JABATAN	
Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
Jabatan Struktural : Esselon II : 1 Esselon III : 7 Esselon IV : 7 Subkoordinator : 14 Jabatan Fungsional : 71	Jabatan Pelaksana : 72

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan dan pertumbuhan perdagangan”, antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan
2. Masih rendahnya pertumbuhan jumlah industri
3. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri
4. Masih rendahnya pertumbuhan perdagangan
5. Masih rendahnya pertumbuhan ekspor
6. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN						PEGAWAI YANG ADA						JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI					JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKUTRAL														
1	Kepala Dinas	1		1			1		1					1	
2	Sekretaris	1			1		1			1				1	
3	Kepala Bidang/UPTD	6		3	3		6		3	3				6	
4	Kepala Subbag/Seksi	7		2	5		7		2	5				4	3
5	Subkoordinator	14		3	11		14		3	11				8	6
B	JABATAN FUNGSIONAL														
1	Penyuluh Perindag	12		1	9	2	9		2	5	2			4	5
2	Analisis Perdagangan	17		2	15		7		2	5				6	1
3	Perencana	1			1		1			1				1	
4	Pranata Humas	1			1		1			1				1	
5	Pengawas Perdagangan	18		2	16		6	1		5				4	2
6	Statistisi	1			1										
7	Pranata Komputer	3				3	1					1			1
8	Arsiparis	2				2	1					1			1

9	Analisis Kepegawaian / SDA Aparatur	1			1			1		1				1	
10	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	1			1										
11	Penguji Mutu Barang	13			2	9	2	7			1	5	1	4	3
12	Instruktur	1			1			1			1				1
C	JABATAN PELAKSANA														
1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	2			2			2			2			1	1
2	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	1				1									
3	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1					1								
4	Penyusun Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2			2			1			1				1
5	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	3					3	3					3	1	2

6	Pengadministrasi Umum	4				4	3					3	1	2
7	Bendahara	6			5	1	6			5	1		1	5
8	Penata Laporan Keuangan	2			2		2			2			1	1
9	Pengadministrasi Keuangan	1				1	1					1		1
10	Analisis Industri	9			9		7			7			4	3
11	Pengawas Standardisasi Industri	1			1		1			1			1	
12	Pengadministrasi Perizinan	2				2	2					2	2	
13	Pengelola Data Mutu dan Supervisi	1				1								
14	Analisis Standardisasi dan Teknologi	2			2		1			1				1
15	Pengelola Sarana dan Prasarana SDA	1				1	1				1			1
16	Fasilitator Perdagangan	9			9		4			4			2	2
17	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	2				2	2				2			2
18	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	1			1		1			1			1	

30	Perancang Grafis	3			3			1			1			1	
31	Pengelola Gudang	1				1		1				1			1
32	Operator Mesin	2					2								
33	Penelaah Pengembangan Usaha	1			1			1			1			1	
34	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1			1										
D	PHL														
1	Pramubakti							34		1	16	3	14	15	19
2	Cleaning Servise							8			1		7	6	2
3	Satpam							8			2		6	8	
4	Sopir							3					3	3	
JUMLAH		172	0	14	112	29	17	166	1	15	87	21	42	95	71

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 87 orang (52,41%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 42 orang (25,30%), D3 sebanyak 21 orang (12,65%), S2 sebanyak 15 orang (9,04%) dan S3 sebanyak 1 orang (0,60%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah	3	708.461.746,00
	tanah	3	708.461.746,00
2	Peralatan dan mesin	1.766	17.760.520.081,50
	alat besar	4	849.865.000,00
	alat angkutan	12	1.737.434.200,00
	alat bengkel dan alat ukur	100	1.195.379.430,00
	alat pertanian	77	191.461.500,00
	alat kantor dan rumah tangga	1.043	2.237.653.988,00
	alat studio, komunikasi dan pemancar	33	1.735.324.847,00
	alat kedokteran dan kesehatan	2	17.223.800,00
	alat laboratorium	498	8.243.926.492,50
	alat persenjataan	-	0,00
	komputer	190	1.552.250.824,00
	alat eksplorasi	-	0,00
	alat pengeboran	-	0,00
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian	-	0,00
	alat bantu eksplorasi	-	0,00
	alat keselamatan kerja	-	0,00
	alat peraga	-	0,00
	peralatan proses/produksi	-	0,00
	rambu – rambu	-	0,00
	peralatan olah raga	-	0,00
3	Gedung dan bangunan	21	5.619.494.296,82
	bangunan gedung	21	5.619.494.296,82
	monumen	-	0,00

	bangunan menara	-	0,00
	tugu titik kontrol/pasti	-	0,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	3	227.226.000,00
	jalan dan jembatan	-	0,00
	bangunan air	-	40.826.000,00
	instalasi	2	166.400.000,00
	jaringan	1	20.000.000,00
5	Aset tetap lainnya	6	450.000,00
	bahan perpustakaan	5	450.000,00
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahra	-	0,00
	hewan	-	0,00
	biota perairan	-	0,00
	tanaman	-	0,00
	barang koleksi non budaya	1	0,00
	aset tetap dalam renovasi	-	0,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	0,00
	konstruksi dalam pengerjaan	-	0,00
7	dll.Aset Lainnya	54	297.553.000,00
	Aset Lain-Lainnya	54	297.553.000,00
	Total		24.613.705.124,32

Kendaraan operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 5 unit kendaraan operasional, 8 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak 90% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2022	Rp 35.794.486.261	Rp 2.716.176.144	Rp -	Rp -	Rp 38.510.662.405
2023	Rp 38.794.876.808	Rp 1.407.852.049	Rp -	Rp -	Rp 40.202.728.857

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 1.692.066.452 Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/149/LHE/ITDA/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2023 :</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target antara Renstra dengan IKU, Perjanjian Kerja dan Rencana Kerja harus selaras 2. Unit kerja melakukan penerapan akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja telah sampai ke level eselon 4 3. Pencapaian sasaran kinerja organisasi hendaknya dapat didukung data yang sesuai 	<p>Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2023 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah di selaraskan pada IKU, PK Perubahan dan Renja Perubahan 2022 2. Penerapan akuntabilitas kinerja dan pengukuran kinerja telah dilakukan terhadap target dan realisasi triwulan sampai eselon 4 3. Data yang dipakai dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi adalah data Berita Resmi Statistik

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan (Sasaran RPD yang diampu PD) Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan
2. Indeks Reformasi Birokrasi

Adapun sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	14,500	15,250	16,000	16,750	17,500	17,500	
2.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	11,750	12,250	12,900	13,550	14,200	14,200	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah (Disperindag)	Nilai	65	67	67	67	67	67	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk
2.	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas	Peningkatan akses data dan informasi

		Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
--	--	--	---

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 (sesuai dokumen PK)

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp2.131.994.110	Rp2.390.993.454	Rp258.999.344
		<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</i>	<i>Rp1.178.997.610</i>	<i>Rp1.421.996.954</i>	Rp242.999.344
		<i>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPK)</i>	<i>Rp952.996.500</i>	<i>Rp968.996.500</i>	Rp16.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Rp333.499.700	Rp443.499.700	Rp110.000.000

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</i>	<i>Rp333.499.700</i>	<i>Rp443.499.700</i>	<i>Rp110.000.000</i>
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp140.997.700	Rp139.743.695	-Rp1.254.005
		<i>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	<i>Rp140.997.700</i>	<i>Rp139.743.695</i>	<i>-Rp1.254.005</i>
2. Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp131.974.500	Rp137.974.500	Rp6.000.000
		<i>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor</i>	<i>Rp11.999.700</i>	<i>Rp11.999.700</i>	<i>Rp0</i>

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		<i>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Rp8.987.200</i>	<i>Rp8.987.200</i>	Rp0
		<i>Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar</i>	<i>Rp19.998.000</i>	<i>Rp25.998.000</i>	Rp6.000.000
		<i>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</i>	<i>Rp90.989.600</i>	<i>Rp90.989.600</i>	Rp0
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp393.962.084	Rp330.566.476	-Rp63.395.608
		<i>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas</i>	<i>Rp393.962.084</i>	<i>Rp330.566.476</i>	<i>-Rp63.395.608</i>

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp219.200.000	Rp13.532.214.674	Rp13.313.014.674
		<i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Rp89.200.000</i>	<i>Rp89.200.000</i>	<i>Rp0</i>
		<i>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>	<i>Rp39.000.000</i>	<i>Rp13.352.014.674</i>	<i>Rp13.313.014.674</i>
		<i>Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</i>	<i>Rp91.000.000</i>	<i>Rp91.000.000</i>	<i>Rp0</i>
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp406.198.900	Rp406.198.900	Rp0

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi</i>	<i>Rp406.198.900</i>	<i>Rp406.198.900</i>	Rp0
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp766.074.508	Rp1.042.180.358	Rp276.105.850
		<i>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rp176.999.700</i>	<i>Rp226.984.200</i>	Rp49.984.500
		<i>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (BPSMB)</i>	<i>Rp465.576.008</i>	<i>Rp453.703.458</i>	-Rp11.872.550
		<i>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rp123.498.800</i>	<i>Rp361.492.700</i>	Rp237.993.900
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp609.994.259	Rp686.594.030	Rp76.599.771
		<i>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</i>	<i>Rp140.000.000</i>	<i>Rp140.000.000</i>	Rp0

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		<i>Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (RPK)</i>	<i>Rp125.999.500</i>	<i>Rp125.999.500</i>	Rp0
		<i>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Rp47.000.100</i>	<i>Rp74.999.600</i>	Rp27.999.500
		<i>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK)</i>	<i>Rp41.999.629</i>	<i>Rp41.999.629</i>	Rp0
		<i>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<i>Rp112.997.850</i>	<i>Rp114.998.121</i>	Rp2.000.271
		<i>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (RPK)</i>	<i>Rp141.997.180</i>	<i>Rp188.597.180</i>	Rp46.600.000
3. Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah (Disperindag)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp19.577.766.741	Rp20.129.141.309	Rp551.374.568
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (BPSMB)	Rp491.802.848	Rp465.751.646	-Rp26.051.202
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (RPK)	Rp442.986.315	Rp497.870.115	Rp54.883.800
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Indikator Sasaran			Rp25.646.451.665	Rp40.202.728.857	Rp14.556.277.192

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	15,250	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15,250
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	12,250	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	12,250
3.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	67	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	67

Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reuiu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai


berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	15,250	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15,250
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	12,250	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	12,250
3.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	67	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	67

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran bertambah 4,39% sehubungan adanya penambahan kekurangan penyediaan Gaji dan tunjangan karena perpindahan dan mutasi pegawai dan penambahan anggaran untuk pembiayaan pendukung Operasi Pasar Murah Bersubsidi yang merupakan luncturan dana DID tahun 2022
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi, yaitu:
 - 3.1. Program Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri: Rp 615.973.000
 - 3.2. Program Perdagangan Luar Negeri, Peningkatan Perdagangan Luar Negeri: Rp 177.966.000



3.3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Penumbuhan
dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka: Rp
1.081.900.000

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Realisasi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KRITERIA Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator/meta indikator	Satuan	Base line 2022	Capaian 2022	Tahun 2023				Target akhir Renstra
						Tar Get	Reali Sasi	Persen Tase	Kriteria / kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Triliyun Rupiah	14,500	20,810	15,250	21,705	142,33%	Sangat Baik	17,500
		<u>Formula</u> <u>Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)								
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Triliyun Rupiah	11,750	14,979	12,250	16,103	131,45%	Sangat Baik	14,200
		<u>Formula</u> <u>Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)								
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	80	87,79	67	87,79	131,03%	Sangat Baik	67
		<u>Formula</u> <u>Perhitungan:</u> Nilai RB Perangkat Daerah Tahun (N)								

Sumber: BRS No. 13/02/19/Th. XXII, 5 Februari 2024 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2023

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (sasaran kesatu)

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.1.1.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N), Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 21,406 Triliyun Rupiah atau sebesar 140,37% dari target 15,250 Triliyun Rupiah. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.3.1.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ba seline	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	20,810	15,250	21,705	142,33%	17,500	124,03%

Sumber: BRS No. 13/02/19/Th. XXII, 5 Februari 2024 *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2023*

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai **21,705 Triliyun Rupiah** (kolom 5), dengan demikian

prosentase realisasi terhadap target 15,250 Triliyun Rupiah atau sebesar 142,33% (kolom 6) terlampaui.

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 20,810 Triliyun Rupiah (kolom 3), terhadap target tahun lalu sebesar 14,500 Triliyun Rupiah data Lkj Tahun lalu) atau sebesar 143,52% terdapat peningkatan realisasi sebesar 0,895 Triliyun Rupiah.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan dan Pembangunan Industri mempunyai Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri formula perhitungan indikator ini adalah:

- a. $(\text{Jumlah Usaha Industri}(N) - \text{Jumlah Usaha Industri}(N-1)) / \text{Jumlah Usaha Industri}(N-1) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $((22.906 - 22.231) / 22.231) \times 100\% = 3,04\%$ dari target 2,5 atau sebesar $(3 / 2,5) \times 100\% = 121,45\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 2,00% (capaian tahun lalu).

- b. $(\text{Jumlah desain dan cetak kemasan Produk UMKM yang terfasilitasi}(N) / \text{Jumlah Produk UMKM yang mengajukan fasilitas}(N)) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(471 + 592) / (483 + 592) \times 100\% = (1063 / 1075) \times 100\% = 98,88\%$ dari target 60,00% atau sebesar 164,80%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi/rendah*) dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 100,00% (capaian tahun lalu). (UPTD RPK)

Capaian ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

- Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - ✓ Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (UPTD RPK)
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan sasaran program Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri mempunyai Indikator:
- a. Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memenuhi komitmen perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)(N)}) / \text{Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang mengajukan perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)(N)} \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(6/6) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 60%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini secara persentase sama jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar $(5/5) \times 100\% = 100\%$ (capaian tahun lalu) namun secara kuantitas melebihi

dari tahun sebelumnya.

- b. Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang diawasi dan dikendalikan (N))/Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang terdaftar di SIINas (N))x100%. Capaian indikator kinerja adalah $(37/76) \times 100\% = 48,68\%$ dari target sebesar 50%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar $(35/76) \times 100\% = 46,05\%$ (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi
- 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan sasaran program Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mempunyai Indikator Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas formula perhitungan indikator ini adalah (Jumlah Laporan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri di SIINas(N))/Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang terdaftar di SIINas(N)) x100%. Capaian indikator kinerja adalah $(62/76) \times 100\% = 81,59\%$ dari target sebesar 80%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar $(50/76) \times 100\% =$

65,79% (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - Subkegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas
 - Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas


Tabel III.3.1.1.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan <u>Formula Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun (N)	15,250	21,705	142,33%




Sumber: BRS No. 13/02/19/Th. XXII, 5 Februari 2024 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2023

Gambar III.1 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</p>
2.		<p>Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</p>
3.		<p>Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</p>

4.		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
5.		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
6.		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

<p>7.</p>		<p>Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</p>
<p>8.</p>		<p>Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (UPTD RPK)</p>

9.		<p>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</p>
10.		<p>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</p>
11.		<p>Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>

3.1.2. Faktor Pendukung keberhasilan

- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Perencanaan dan Pembangunan Industri adalah:
 - Pertumbuhan pada subkategori industri makanan dan minuman,
 - Meningkatkan sarana dan prasarana terhadap mesin dan peralatan agar dapat menghasilkan produk kemasan IKM yang berkualitas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada para pelaku usaha IKM,
- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Pengendalian Izin Usaha Industri adalah:
 - Adanya dukungan kebijakan pemerintah proses penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA,
 - Kesadaran pelaku usaha pentingnya perizinan yang dimiliki.
- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional adalah:
 - Adanya dukungan kebijakan peraturan perundangan,
 - Kesadaran pelaku usaha dalam penginputan data industri.

3.1.3. Faktor Penghambat keberhasilan

- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Perencanaan dan Pembangunan Industri adalah:
 - Belum optimalnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam,
 - Belum optimalnya penyebaran informasi tentang pemanfaatan fasilitas layanan promosi dan kemasan di Kab/Kota,
 - Keterbatasan teknologi mesin dan peralatan serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku IKM,
 - Belum adanya dukungan intervensi secara regulasi untuk mengarahkan pemanfaatan layanan kemasan.
- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Pengendalian Izin Usaha Industri adalah:

- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi teknologi,
- Belum optimalnya pengembangan industri prioritas.
- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional adalah:
 - Keterbatasan pengembangan usaha industri hilirisasi produk,
 - Kurangnya kepatuhan pelaku usaha industri besar dalam penyampaian data industri,

3.1.4. Upaya kedepan mendukung keberhasilan

- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Perencanaan dan Pembangunan Industri dapat tercapai:
 - Percepatan hilirisasi produk-produk dalam RPIP dengan melibatkan stakeholder terkait,
 - Upgrading skill Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sumber Daya Mesin dan Peralatan yang dimiliki,
 - Perlunya intervensi regulasi yang sifatnya himbauan dalam rangka pemanfaatan layanan kemasan secara maksimal.
- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Pengendalian Izin Usaha Industri dapat tercapai:
 - Meningkatkan koordinasi lintas sektor terhadap pengendalian izin usaha industry,
 - Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia/ Tenaga Kerja Industri.
- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dapat tercapai:
 - Mengoptimalkan pengembangan usaha industri hilir,
 - Optimalisasi pelaksanaan edukasi kepatuhan penyampaian data industri bagi pelaku usaha.

3.2.1. Sasaran : Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan (sasaran kedua)

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.2.1.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	Formula Perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)

Kinerja sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan: Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N), Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 15,550 Triliyun Rupiah atau sebesar 126,94% dari target 12,250 Triliyun Rupiah. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.3.2.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/baseline	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	14,979	12,250	16,103	131,45%	14,200	113,40%

BRS No. 13/02/19/Th. XXII, 5 Februari 2024 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV-2023

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai **16,103 Triliyun Rupiah** (kolom 5), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target **12,250 Triliyun Rupiah** atau sebesar **131,45%** (kolom 6) terlampaui.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar **14,979 Triliyun Rupiah** (kolom 3), terhadap target tahun lalu **11,750 Triliyun Rupiah** atau sebesar **127,48%** (data Lkj Tahun lalu) terdapat peningkatan sebesar **1,124 Triliyun Rupiah**.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan Ketertiban dalam Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai Indikator kinerja Persentase Tertib Usaha formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah Pelaku Usaha B2 yang berizin}(N)/\text{Jumlah Pelaku Usaha B2}(N1)) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(2/2) \times 100\% = 100,00\%$ dari target 2 atau sebesar 100,00%.

Capaian ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- ✓ Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan

Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi

- Subkegiatan Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - ✓ Kegiatan Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar
 - Subkegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
 - Subkegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
 - ✓ Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sasaran program Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai Indikator Persentase sarana distribusi yang terkelola dengan baik formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Jumlah sarana distribusi yang terkelola dengan baik}(N)/\text{Jumlah sarana distribusi yang terkelola}) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(16/19) \times 100\% = 84,21\%$ dari target sebesar 75,00% atau sebesar $(84,21/75) = 112,28\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 80,00% (capaian tahun lalu).
- Capaian ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub indikator sebagai berikut:
- ✓ Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas
 - Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
 - Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

- Subkegiatan Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan sasaran program Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mempunyai Indikator Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Koefisien Variasi < 9%. Capaian indikator kinerja adalah 8,44 atau $(8,5 - (8,44 - 8,5)) \times 100\% = 100,71\%$ dari target sebesar 8,5%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 6,00% (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
- ✓ Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota
 - Subkegiatan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah, Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- ✓ Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran

dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

- Subkegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
- Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

4. Program Pengembangan Ekspor dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Pertumbuhan dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Daerah mempunyai Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan nilai ekspor formula perhitungan indikator ini adalah $(\text{Nilai Ekspor}(N) - \text{Nilai Ekspor}(N-1)) / \text{Nilai Ekspor}(N-1) \times 100\%$. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(2.110.133.416 - 2.640.114.240) / 2.640.114.240 \times 100\% = -20,07\%$ dari target 4,00% atau sebesar -246,86%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar -1,20% (capaian tahun lalu).

Capaian ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi
 - Subkegiatan Pameran Dagang Internasional/Nasional
 - Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 - Subkegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor
 - Subkegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan sasaran program Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen mempunyai Indikator:

- a. Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen formula perhitungan indikator ini adalah Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen(N). Capaian indikator kinerja adalah $(42/42) \times 100\% = 100,00\%$ dari target sebesar 42,00.

- b. Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB) dengan indikator (Jumlah komoditas yang memenuhi standardisasi(N)/Jumlah komoditas potensial(N))x100%. Capaian indikator kinerja adalah $(1/1) \times 100\% = 100,00\%$ dari target sebesar 1 atau sebesar $(1/1) = 100,00\%$. Capaian kinerja pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yang sebesar 100,00% (capaian tahun lalu). (UPTD BPSMB)

Capaian ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota
 - Subkegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
 - Subkegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
 - Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Verifikasi Mutu Produk (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pengembangan Layanan Pengujian (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pengembangan Layanan Kalibrasi (UPTD BPSMB)
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

- Subkegiatan Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan sasaran program Mengikatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai Indikator Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar formula perhitungan indikator ini adalah:

- a. $(\text{Jumlah Produk Lokal yang dipasarkan}(N)/\text{Jumlah Produk Lokal yang di fasilitasi}(N)) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(110/55) \times 100\% = 200,00\%$ dari target sebesar 110 UMKM. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 100,00% (capaian tahun lalu).
- b. $(\text{Jumlah Produk IKM yang dipasarkan}(N)/\text{Jumlah Produk IKM}(N)) \times 100\%$. Capaian indikator kinerja adalah $(57/97) \times 100\% = 58,76\%$ dari target sebesar 40,00% atau sebesar $(58,76\%/40,00\%) = 146,90\%$. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih tinggi/rendah *) dibandingkan pada Tahun 2022 yang sebesar 100,00% (capaian tahun lalu). (UPTD RPK)

Capaian ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 8 (delapan) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
 - Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

- Subkegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Subkegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (UPTD RPK)
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (UPTD RPK)
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (UPTD RPK)

Tabel III.3.2.1.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
2.	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan <u>Formula Perhitungan:</u> Nilai PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Tahun (N)	12,250	16,103	131,45%

Sumber: BRS No. 90/11/19/Th. XVII, 6 November 2023 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III-2023, estimasi Triwulan IV

*** Angka Sangat Sementara*

Gambar III.2 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor</p>
2.		<p>Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</p>
3.		<p>Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Lelang Komoditas</p>

4.		<p>Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</p>
6.		<p>Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten / Kota yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan</p>
7.		<p>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Lebih Dari 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi</p>

<p>8.</p>		<p>Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota subkegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen (Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen)</p>
<p>9.</p>		<p>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai parameter ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</p>

10.		<p>Sub Kegiatan Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</p>
11.		<p>Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah (UPTD BPSMB)</p>
12.		<p>Pengujian dan Sertifikasi di seluruh Kabupaten/Kota</p>

<p>13.</p>		<p>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p>
<p>14.</p>		<p>Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</p>
<p>15.</p>		<p>Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</p>

16.		Kegiatan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)
17.		Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)
18.		Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (UPTD RPK)

3.2.2. Faktor Pendukung keberhasilan

- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan adalah:
 - Terpantaunya terhadap komitmen pelaku usaha dalam memiliki perizinan perdagangan,
 - Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan perdagangan yang mereka miliki serta memfasilitasi pemenuhan komitmen surat izin usaha perdagangan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan adalah:
 - Semakin baiknya sistem distribusi,
 - Meningkatnya jumlah pasokan barang kebutuhan pokok.
- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah:
 - Melakukan Operasi Pasar dan Pasar Murah untukantisipasi dan menekan laju inflasi,
 - Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Pengembangan Ekspor adalah:
 - Tersedianya pelabuhan yang lebih referensiatif dan memadai untuk aktifitas ekspor.
 - Adanya diversifikasi produk ekspor,
 - Dukungan fasilitasi promosi dari pemerintah pusat/daerah,
 - Pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor daerah.
- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah:
 - Peningkatan pemahaman masyarakat akan Hak-nya sebagai konsumen untuk berani melaporkan setiap kerugian atas transaksi pembelian/konsumsi yang dilakukan, terutama

- kerugian yang berdampak luas kepada masyarakat,
- Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan edukasi kepada konsumen mengenai aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
 - Peningkatan pelayanan pengujian komoditi potensial berdasarkan SNI (Lada, CPO dan Mikrobiologi) yang terakreditasi KAN sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap Laboratorium Pengujian BPSMB.
- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri adalah:
- Terjalin kolaborasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder yang mendukung pemasaran produk,
 - Kualitas media pendukung pemasaran produk seperti kemasan dan media promosi,
 - Fasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis pengenalan marketplace e-commerce melalui platform seperti Bukalapak, Tokopedia, Shoopee dsbnya;
 - Fasilitasi Promosi melalui Video ke pelaku usaha yang potensial;
 - Fasilitasi penyelenggaraan Sosialisasi Kecintaan Generasi Muda dalam penggunaan produk Indonesia.

3.2.3. Faktor Penghambat keberhasilan

- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan adalah:
- Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami tentang perizinan perdagangan,

- Masih adanya pelaku usaha yang enggan untuk koordinasi kepada petugas dalam hal untuk pengurusan perizinan perdagangan.
- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan adalah:
 - Masih lemahnya sistem pengumpulan data dan informasi,
 - Tidak tersedianya pusat perdagangan grosir.
- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah:
 - Terhambatnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah hingga ke agen dan toko-toko,
 - Masih terdapat distributor dan agen yang menimbun barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Pengembangan Ekspor adalah:
 - Harga jual rata - rata logam timah LME sepanjang tahun 2023 sebesar USD26.470 per metrik ton, turun 15.90% dibanding tahun 2022 sebesar USD31.474 per metrik ton,
 - Belum tersediannya pelabuhan yang referensiatif dan memadai untuk aktifitas ekspor.
 - Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Komoditas karet tidak melalui Bangka Belitung dikarenakan Kelangkaan container yang dapat mempengaruhi jadwal keberangkatan atau pengiriman barang ekspor ke negara tujuan, Freight naik sangat tinggi dari 3.500 USD/container sebelumnya menjadi 4.500 USD/container atau naik sebesar 31,42 persen, Transportasi pengangkutan harus via Jakarta sehingga dibutuhkan biaya pengangkutan yang begitu besar dikarena membutuhkan 2 kali stuffing.
- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen adalah:

- Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui lembaga perlindungan konsumen. Sehingga perlu adanya edukasi dan sosialisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia kepada masyarakat melalui pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi,
- Ketersediaan regulasi layanan pengujian kesadaran pengusaha atas produk ber SNI masih rendah.
- Masih banyak stakeholders' yang belum mengetahui pelayanan pengujian mutu barang oleh Laboratorium BPSMB yang sudah terakreditasi KAN.
- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri adalah:
 - Masih minimnya kesadaran atau usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk secara mandiri. Pelaku usaha cenderung sangat bergantung dengan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran yang dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait,
 - Masih minimnya kesadaran pelaku usaha untuk membangun citra dan kualitas produk, sehingga berakibat minimnya daya saing produk dipasar nasional,

3.2.4. Upaya kedepan mendukung keberhasilan

- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dapat tercapai:
 - Penyelenggaraan edukasi dan advokasi pelaku usaha yang efektif,
 - Memfasilitasi Penyediaan sistem pelayanan melalui elektronik,
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan administrasi perizinan terhadap pelaku usaha perdagangan.
- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dapat tercapai:
 - Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha distribusi,

- Membuat suatu sistem informasi terpadu terkait data informasi perdagangan.
- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dapat tercapai:
 - Melakukan pengawasan kepada distributor dan agen-agen agar tidak melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang penting di saat terjadi kelangkaan barang,
 - Edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying apabila mendapat informasi tentang kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Pengembangan Ekspor dapat tercapai:
 - Meningkatkan diversifikasi produk ekspor.
 - Meningkatkan promosi produk ekspor daerah,
 - Mendukung peningkatan fasilitas dan sarpras pendukung kegiatan ekspor,
 - Meningkatkan kerjasama antar stakeholder pendukung ekspor.
 - Diharapkan kedepan Bangka mempunyai lebih ekspedisi untuk kontainer reefer dengan harga yang sesuai.
 - Pengadaan BIMTEK peningkatan kapasitas ekspor dan Pemasaran dengan ITPC dan ATDAG
- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dapat tercapai:
 - Penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif,
 - Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan peredaran barang/jasa, dengan cara meningkatkan pengenalan kepada konsumen mengenai lokasi dan fungsi dari lembaga-lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mulai dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen

- Swadaya Masyarakat (LPKSM), termasuk Kementerian Perdagangan selaku leading sector perlindungan konsumen.
- Penyampaian informasi mengenai Laboratorium terakreditasi KAN melalui berbagai media elektronik
 - ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dapat tercapai:
 - Melakukan kegiatan promosi yang tepat sasaran,
 - Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait guna mendukung pemasaran produk,
 - Melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap peningkatan kualitas usaha dan produk,
 - Melakukan koordinasi sinergi dan kolaborasi pemberdayaan UMKM seperti pendampingan kepada pelaku UKM melalui Forum UMKM terutama yang prematur dalam menjalankan usaha.

3.3.1. Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (sasaran ketiga)

Kinerja sasaran Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan diukur dengan indikator Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.3.1.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
3.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Formula Perhitungan: Nilai RB Perangkat Daerah Tahun (N)

Kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan: Nilai RB Perangkat Daerah Tahun (N), Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah 87,79 atau sebesar 131,03% dari target 67. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.3.3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/baseline	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Nilai RB Perangkat Daerah	87,79	67	87,79	131,03%	67	131,03%

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- d. Tercapai 87,79 (kolom 5), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target 67 sebesar 131,03% (kolom 6) terlampaui.
- e. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 87,79 (kolom 3), terhadap

target tahun lalu 80 atau sebesar 109,74% (data Lkj Tahun lalu) terdapat peningkatan sebesar 21,29%

- f. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi kinerja program Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah mempunyai Indikator kinerja Nilai RB Perangkat Daerah (Nilai) formula perhitungan indikator ini adalah Nilai RB Perangkat Daerah (N). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(31,14/36,30) \times 100\% = 85,79\%$ dari target 80 atau sebesar 85,79%.

Capaian ini didukung oleh 18 (delapan belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub indikator sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD BPSMB)
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD BPSMB)
- ✓ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD BPSMB)
- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD BPSMB)

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD BPSMB)
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPTD BPSMB)
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung (UPTD BPSMB)
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (UPTD RPK)
- ✓ Kegiatan Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD RPK)
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPTD RPK)




- Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (UPTD RPK)
- Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD RPK)
- ✓ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD RPK)
- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor (UPTD RPK)
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD RPK)
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (UPTD RPK)

Tabel III.3.3.1.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3	Nilai RB Perangkat Daerah <u>Formula Perhitungan:</u> Nilai RB Perangkat Daerah Tahun (N)	67,000	87,79	131,03%

Gambar III.3 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.		<p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT BPSMB)</p>
5.		<p>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Diklat Penguji Mutu Barang Terampil)</p>
6.		<p>Uji Kompetensi Petugas Pengambil Contoh (PPC)</p>

7.



Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (CCTV, AC dan Laptop)

3.3.2. Faktor Pendukung keberhasilan

- ✓ Faktor pendukung tercapainya target indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah:
 - Sinergitas dan koordinasi SDM Sekretariat dengan bidang terkait sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang ada,
 - Melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan/diterapkan,
 - Tersedianya fasilitas sarana prasarana kantor yang mendukung (komputer dan peralatannya, jaringan internet, dll)
 - SDM yang berkompeten sesuai peta jabatan yang telah ditetapkan,
 - Ketersediaan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan unit kerja.

3.3.3. Faktor Penghambat keberhasilan

- ✓ Faktor penghambat tercapainya target indikator program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah:
 - Tugas dan Fungsi yang tumpang tindih, fungsi yang belum terakomodir, fungsi yang tidak efektif, volume beban kerja unit kerja, unit kerja yang tidak inline dengan sasaran kinerja PD,
 - Terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan satuan kerja
 - Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di satuan kerja,
 - Kurangnya SDM yang kompeten sesuai peta jabatan yang telah ditetapkan,

3.3.4. Upaya kedepan mendukung keberhasilan

- ✓ Upaya kedepan agar indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dapat tercapai:
 - Melakukan Analisa jabatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal satuan kerja

- Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan satuan kerja
- Mengoptimalkan dukungan anggaran dan SDM.
- Memfasilitasi Penyediaan sistem pelayanan melalui elektronik.
- Mengupayakan pelatihan dan sertifikasi terhadap SDM yang ada.

3.4. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Nilai Lapangan Usaha Industri Pengolahan	15,250	21,705	142,33%	2.974.236.849	2.754.144.344	92,60%	220.092.505	
2.	Meningkatnya Lapangan Usaha Perdagangan	Nilai Lapangan Usaha Perdagangan	12,250	16,103	131,45%	16.135.728.938	15.691.276.303	97,25%	444.452.635	
3.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	67	87,79	131,03%	21.092.763.070	20.495.766.819	97,17%	596.996.251	
Total Belanja						40.202.728.857	38.941.187.466	96,86%	1.261.541.391	

Sumber: SIPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2023, Laporan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 40.202.728.857 (kolom 7), terealisasi Rp 38.941.187.466 (kolom 8) atau 96,86% (kolom 9) sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 1.261.541.391 (kolom 10) yang bersumber dari:

- Efisiensi belanja Subkegiatan.
- Efisiensi belanja pengadaan barang dan jasa.

3.5. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi SI KELASAN (Sistem Informasi Kendali dan Layanan Kemasan) yang berbasis web-based apps, yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha IKM se- Provinsi Babel dalam memesan kemasan tanpa harus datang ke UPTD Rumah Promosi dan Kemasan guna menjangkau IKM/UMKM di seluruh Babel
- c. Aplikasi Sistem Pasar Lelang Terpadu, untuk Pasar Lelang Online bersama Koperasi Petani Lada Bangka Belitung
- d. Layanan Pengaduan Konsumen Online
 - o WA: 08117109666
 - o IG: Perlindungan Konsumen Babel
 - o FB: Perlindungan Konsumen Babel

3.6. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Mitra Strategis Terbaik dalam Pengembangan Ekonomi dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pemda Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 se-Bangka Belitung Kategori Badan Publik OPD Provinsi dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Sponsorship Kegiatan Tradisi Korps IKAPTK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari DPP IKAPTK Kepulauan Bangka Belitung

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pertumbuhan usaha industri dan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha industri besar dalam penyampaian data industri
2. Kurangnya pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari produsen ke distributor di daerah dan pengendalian harga dan operasi pasar

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala Rapat Internal.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan terkait pertumbuhan industri dan perdagangan.
2. Melakukan koordinasi dalam rangka dengan Kabupaten Kota terkait pengawasan usaha industri dan pengawasan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dari dan operasi pasar.

LAMPPIRAN

Lampiran 1. Scan Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2023

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Lampiran 4. Evaluasi LKj PD Tahun 2023

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2023

Lampiran 6. SK IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023